

KURIKULUM MUATAN LOKAL
(Konsep dan Pelaksanaannya di Sekolah Dasar)

MAKALAH

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TSL :	12 MAR 1997
SUMBER / HASIL :	K /
KOLEKSI :	KI
NO. INVENTARIS :	524/K/97-K.1(2)
KLASIFIKASI :	372.19071 BEN 2



Oleh:
ALWEN BENTRI
Staf Pengajar FIP-IKIP Padang

JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
April, 1995

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL

(Konsep dan Pelaksanaannya di Sekolah Dasar)

I. PENDAHULUAN

Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pemberian pengetahuan, keterampilan dan sikap merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang utuh. Hal ini sejalan dengan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, T. Paka Joni (1990:469), mengemukakan bahwa:

Pendidikan merupakan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berperanan menentukan...menjadi cutting edge... di dalam pemanfaatan sumber daya alam demi peningkatan mutu kehidupan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan wawasan masa depan.

Untuk mewujudkan maksud di atas tidaklah mudah dan dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Namun, memerlukan usaha dan dukungan seluruh bangsa serta waktu yang panjang. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang utuh dan berkualitas, membutuhkan seperangkat sarana pendukung yang memadai. Dalam sistem pendidikan pada umumnya dan sekolah pada khususnya, kurikulum merupakan elemen

penting yang cukup esensial dan utama. Karena itu masalah kurikulum terutama di sekolah dasar yang merupakan lembaga pendidikan dasar, mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, seperti; ahli pendidikan, ahli kurikulum dan para guru. Pemerintah beserta pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum ini telah menyadari bahwa sudah waktunya dalam pengembangan kurikulum tidak hanya memperhatikan kepentingan nasional tetapi kepentingan daerah juga diperhatikan, karena model pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi, tidak mungkin dipertahankan terus-menerus.

Apabila model pengembangan kurikulum tersebut tetap dipertahankan, maka kemungkinan dapat menimbulkan berbagai kesenjangan bagi dunia pendidikan umumnya, berbagai potensi daerah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, pendidikan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Berkaitan dengan ini M. Fakry Gafar (1990) mengemukakan bahwa sistem pendidikan nasional sekarang ini tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang berlaku memiliki kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan.

Untuk menanggulangi berbagai kelemahan model pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi

tersebut, maka pemerintah mencanangkan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada daerah atau sekolah untuk menyusun kurikulum yang berwawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada daerah atau sekolah menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, di mana sekolah berada. Untuk merealisasikan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, situasi masing-masing daerah maka diberikan porsi 20 % sebagai kewenangannya. Diharapkan porsi tersebut masing-masing daerah dapat mengakomodasikan berbagai potensi (budaya, sosial dan alam) secara maksimal menjadi bahan pengajaran di sekolah. Model pengembangan ini dikenal dengan istilah kurikulum muatan lokal.

Sebagai konsekuensi dari ide pengembangan kurikulum muatan lokal, maka guru sebagai pelaksana utama dituntut untuk aktif dan progresif. Dengan kata lain, bahwa sebagai pelaksana utama pengembangan kurikulum maka guru dituntut agar memiliki sejumlah persyaratan. Hal ini mengingat bahwa mengembangkan suatu kurikulum bukan pekerjaan mudah dan asal jadi.

Untuk dapat mewujudkan pengembangan kurikulum muatan lokal tersebut, maka guru harus memahami berbagai konsep pengembangan kurikulum. Selanjutnya keberhasilan dan kegagalan pengembangan kurikulum sangat tergantung kepada pemahaman dan tindakan-tindakan yang diambil oleh guru terhadap konsep dan

pengembangan kurikulum muatan lokal itu sendiri.

Mencermati uraian di atas, maka permasalahannya di sini adalah: "Bagaimanakah konsep dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal di sekolah dasar?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dalam tulisan ini penulis mencoba mengetengahkan konsep dasar, ruang lingkup dan cara melaksanakan kurikulum muatan lokal ini.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KURIKULUM MUATAN LOKAL

A. Pengertian Kurikulum Muatan Lokal

Berbagai pengertian dan tafsiran yang diberikan orang terhadap istilah kurikulum muatan lokal. Pengertian dan tafsiran yang diberikan cukup beragam dan bervariasi, hal ini tergantung atau dilatar belakangi oleh profesi, visi, pengalaman dan wawasan terhadap kurikulum muatan lokal dari masing-masing orang.

Menurut Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI dalam Surat Keputusannya No. 0412/U/1987 (1987:5) menegaskan bahwa:

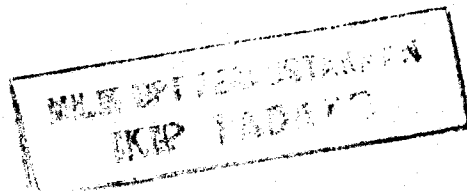
Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu.

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa istilah kurikulum muatan lokal mengandung makna atau fungsi ganda. Dalam pengertian tersebut, menunjukkan bahwa kurikulum muatan lokal berfungsi sebagai penyedia apa yang dapat dipelajari peserta didik. Di samping itu, kurikulum muatan lokal sebagai penyedia sarana yang berguna untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Soedijarto, (1988:9) dengan mengacu pada Surat Keputusan mendikbud RI, mengemukakan bahwa : "Muatan lokal sebagai usaha menterjemahkan GBPP agar lebih relevan dengan minat belajar". Dari pernyataan ini terkandung makna bahwa muatan lokal bukan merupakan program baru yang akan ditawarkan bagi peserta didik di sekolah dasar. Namun konsep muatan lokal merupakan program program yang dikembangkan dengan berpedoman pada GBPP dari setiap bidang studi yang ada. Ini berarti bahwa dalam melaksanakan program yang bermuatan lokal, yakni dilakukan terpadu dengan program yang ada.

Mencermati uraian di atas, tampaknya konsep kurikulum muatan lokal pada dasarnya adalah pengintegrasian potensi daerah ke dalam program GBPP yang sudah ada. Dengan kata lain muatan lokal di sini bukan merupakan mata pelajaran yang berdiri-sendiri.

Apabila diperhatikan UUSPN RI. Nomor II Tahun 1989 Bab IX Pasal 38 Ayat 1, maka kurikulum muatan



lokal dalam di sini tidak lagi sekedar pengintegrasian potensi daerah ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, melainkan merupakan program tersendiri di luar kurikulum yang bermuatan nasional sebagai upaya penyempurnaan dari apa yang diamanatkan oleh Surat Keputusan mendikbud RI No. 0412/U/1987. Hal ini ditegaskan dalam PP No. 28 Tahun 1990 BAB VII Pasal 4 Ayat 3, yaitu:

Satuan pendidikan dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.

Dari pernyataan di atas, semakin jelas bahwa kurikulum muatan lokal merupakan suatu paket program yang terdiri dari beberapa mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan peserta didik. Sebagai contoh dalam rangka merealisasi dari kebijakan ini adalah: Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Kakanwil Depdikbud No. 011.08.C.1994, mensahkan dan memberlakukan kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar dengan 5 (lima) buah mata pelajaran, yaitu: Budaya Alam Minangkabau, Baca Tulis Alqur'an, Baca Tulis Huruf Arab Melayu, Keterampilan tradisional Minangkabau dan Keterampilan Pertanian.

B. Ruang Lingkup Kurikulum Muatan Lokal

Membahas masalah ruang lingkup kurikulum muatan lokal, yaitu potensi-potensi apa yang ada dan yang dapat dikembangkan di daerah atau pada satuan pendidikan.

Bertitik tolak dari konsep dan pengertian sebagaimana yang kemukakan pada bagian terdahulu, maka ruang lingkup muatan lokal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan alam

Lingkungan alam ini dapat dikelompokkan kepada hal-hal: pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan.

2. Lingkungan sosial dan budaya

Lingkungan sosial dan budaya yang terdapat dalam pola kehidupan daerah, seperti: perikanan darat, perikanan laut, peternakan dan perkebunan, perdagangan dan layanan jasa, industri kecil/besar.

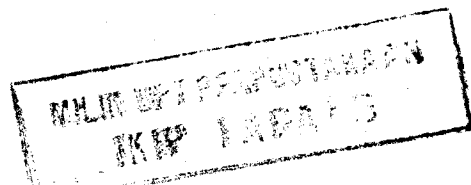
Anwas Iskandar (1988), mengidentifikasi sejumlah unsur yang dapat dijadikan program muatan lokal, seperti; benda alam, baik benda yang terlihat maupun, yang tidak terlihat langsung oleh indra, proses dan peristiwa-peristiwa lokal, bahasa daerah, kebiasaan-

kebiasaan, keterampilan khas daerah, sistem kehidupan dan sebagainya.

Apabila diperhatikan ruang lingkup muatan lokal sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka jelas bahwa sangat luas dan bervariasi bentuk dan ragamnya. Daerah atau lingkungan sekitar peserta didik Lingkungan merupakan sumber belajar yang sangat efektif dalam rangka memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengenal kehidupannya yang sebenarnya, sehingga mereka lebih sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana peserta didik berada.

Sebagai upaya merealisasikannya, walaupun unsur-unsur muatan lokal ini di suatu daerah sangat banyak dan bervariasi, namun tidak berarti semuanya secara sembarangan dapat dijadikan sebagai program muatan lokal. Untuk mengembangkannya seyogyanya memperhatikan berbagai kriteria, seperti: kelayakan, manfaat, kesesuaian dan sebagainya.

Di samping itu, tampak bahwa pelaksanaan kurikulum muatan lokal tidak sekedar membekali peserta didik dengan keterampilan-keterampilan semata. Namun dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang utuh, yakni memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang handal dalam menopang jalannya pembangunan bangsa. Dengan perkataan lain, bahwa lingkup muatan lokal tidak hanya menekankan unsur pengetahuan, tetapi juga pada aspek keterampilan dan sikap. Dengan



diberikannya ketiga aspek tersebut secara proporsional, maka kiranya dapat mewujudkan suatu masyarakat yang utuh sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

III. PENTINGNYA KURIKULUM MUATAN LOKAL

A. Tujuan Muatan Lokal

Berkenaan dengan tujuan kurikulum muatan lokal, Depdikbud (1987:4) memaparkan sebagai berikut:

Kurikulum muatan lokal bertujuan agar: (1) bahan pengajaran akan lebih mudah diserap oleh peserta didik, (2) sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, (3) peserta didik lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya, (4) peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya, (5) peserta didik dapat menolong orangtuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, (6) peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya, (7) peserta didik menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.

Bertitik tolak dari tujuan-tujuan di atas, maka kurikulum muatan lokal pada hakikatnya adalah untuk menjembatani peserta didik dengan lingkungannya. Menjembatani peserta didik dengan lingkungannya merupakan suatu proses melestarikan dan mewariskan kondisi alam, sosial dan budaya yang semakin berkembang.

Proses melestarikan dan mewariskan kondisi alam,

sosial dan budaya tersebut sangat perlu dilakukan sedini mungkin. Hal ini dapat dilakukan yang dimulai dengan pengenalan, pemahaman sampai dengan pemberian keterampilan fungsional yang ada di lingkungan dimana sekolah berada. Keterampilan fungsional adalah keterampilan yang berguna untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, dengan bekal keterampilan fungsional tersebut peserta didik dapat menolong orang tuanya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, diperlukan adanya pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah atau sekolah untuk menyusun kurikulumnya. Hal ini dimaksudkan agar programnya akan sesuai tidak saja dengan pembangunan daerah setempat, tetapi juga dengan lingkungan sekolahnya. Kesempatan dan keleluasaan yang diberikan ini tentu saja tidak mengurangi kurikulum yang bermuatan nasional yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan. Di samping itu adanya kurikulum muatan lokal bukan bertujuan agar peserta didik terjerat dalam lingkungan semata. Sebab daerah atau sekolah berhak mendapat kesempatan guna lebih terlibat dalam mobilitas yang melampaui batas lingkungannya sendiri.

Mendikbud (Fuad Hasan, 1987:11), mengemukakan bahwa:

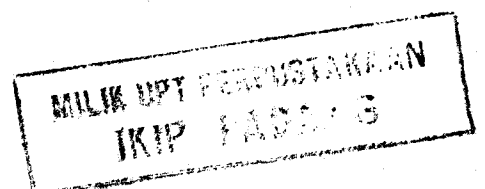
Muatan lokal selain dimaksudkan untuk mempertahankan kelestarian (berkenaan dengan kebudayaan daerah), juga perlu ditujukan pada usaha pembaharuan atau modernisasi (berkenaan dengan keterampilan atau kejuruan setempat) sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern. Selanjutnya muatan lokal dimaksudkan agar pengembangan sumber daya alam dan tenaga manusia yang terdapat di daerah setempat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah, sekaligus mencegah terjadinya depopulasi daerah dari tenaga produktif.

Pernyataan di atas menunjukkan, bahwa muatan lokal pada dasarnya mempunyai dua sasaran utama, yakni dalam rangka melestarikan budaya, pengembangan sumber alam dan tenaga daerah, di samping itu untuk mencegah terserapnya tenaga produktif dari desa ke kota. Dengan perkataan lain, bahwa kurikulum muatan lokal berupaya menjaga tetap lestarnya potensi daerah. Namun, sebaliknya bagaimana memanfaatkan potensi daerah tersebut dijadikan modal untuk membangun bangsa sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Apabila dicermati kedua pendapat di atas maka, secara makro terkandung bahwa kurikulum muatan lokal adalah dalam rangka memacu pembangunan daerah sesuai dengan jati dirinya, di samping itu tetap mengikuti dan memacu kemajuan pembangunan bangsa.

B. Fungsi Kurikulum Muatan Lokal

Munculnya gagasan muatan lokal adalah sebagai implikasi dari konsep rekonstruksi sosial. Karena pada hakikatnya konsep kurikulum rekonstruksi sosial



menelaah berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Ini berarti permasalahan yang ada dan yang terjadi dimasyarakat merupakan sumber bahan pelajaran di sekolah. Dalam tulisan ini permasalahan masyarakat tidak diartikan secara sempit, melainkan diartikan secara luas. Permasalahan masyarakat mencakup kebutuhan, tuntutan, budaya dan segala sumber alam yang ada di setiap daerah atau di sekitar lingkungan sekolah.

Sebagai upaya merealisasikan gagasan di atas, maka kehadiran dan fungsi kurikulum muatan lokal sangat penting artinya (strategis, inovatif dan produktif). Karena pengembangan kurikulum yang seluruhnya dipusatkan (sentralisasi penuh) tidaklah mungkin mencakup muatan lokal yang beraneka ragam itu. Selain itu, besar kemungkinan bahwa kemampuan peserta didik untuk menerima dan memahami bahan pengajaran menjadi berkurang, karena program pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Oleh karena itu, sistem pengembangan yang sentralistik tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi secara ketat. Karena pengembangan kurikulum yang demikian tidak terlepas dari sejumlah kerugian.

Menurut C.E. Beeby (dalam Aziz Wahab, 1990:34),
bahwa:

... sentralisasi yang begini ekstrim cenderung melumpuhkan inisiatif para guru, murid dan pengawas dan membuat mereka selamanya

mengharapkan bimbingan dari Jakarta, namun nyatanya bimbingan Depdikbud itu tidak efisien.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka semakin jelas pula bahwa perlu adanya pengkajian bahkan pengembangan kurikulum yang berwawasan muatan lokal.

M. Fakry Gafar (1990) mengatakan bahwa kehadiran kurikulum muatan lokal mempunyai makna, paling tidak ditinjau dari tiga dimensi, yakni: dimensi isi kurikulum, peserta didik dan kurikulum. Ditinjau dari dimensi isi kurikulum, maka kehadiran kurikulum muatan lokal merupakan upaya untuk memfungsionalkan berbagai potensi daerah menjadi bahan pelajaran. Dari dimensi peserta didik, maka kurikulum muatan lokal menjadikan mereka merasa satu dengan lingkungannya. Hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan tenaga terdidik yang memiliki rasa kewajiban moral yang tinggi terhadap lingkungannya. Sedangkan dari dimensi guru, maka kurikulum muatan lokal akan lebih memfungsionalisasikan profesionalisme guru. Dengan adanya muatan lokal guru memiliki kewenangan membuat keputusan bagi pengembangan isi kurikulum, menemukan strategi pembelajaran dan pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada di sekitarnya. Ini berarti kurikulum muatan lokal memberi implikasi bagi pengembangan kreativitas dan produktivitas yang diwarnai dalam pengimplementasian kurikulum. Apabila daya kreativitas guru

berkembang dengan baik, maka pengelolaan keragaman karakteristik daerah setempat termasuk aspirasinya dapat diakomodasikan. Selain itu, akan mendorong terbinanya kemandirian dalam memilih alternatif terbaik untuk memecahkan masalah setempat, menjawab tuntutan nasional bahkan tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi.

Selanjutnya, fungsi kurikulum muatan lokal ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Anwas Iskandar (1988:5-7) yaitu:

1. Kurikulum muatan lokal sebagai kekuatan pembelajar

Kurikulum muatan lokal sebagai bagian pendidikan dan pengajaran nasional dimaksudkan dalam upaya menjadikan lokal sebagai kondisi, iklim dan tempat yang semakin merangsang peserta didik belajar dengan cara yang subliminal dan eksperimental. Dengan adanya pengenalan terhadap potensi lokal, maka peserta didik akan memiliki berbagai kemampuan untuk menguasai lingkungannya. Peserta didik dapat mengenal, menciptakan dan meningkatkan produktivitas berbagai potensi yang ada di sekitarnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan dirinya sendiri. Misalnya, peserta didik dapat belajar meningkatkan produktivitas dengan jalan bercocok tanam.

2. Kurikulum muatan lokal sebagai jalan mengenali diri

Kurikulum muatan lokal berfungsi sebagai upaya mengenali diri. Misalnya, peserta didik tahu tentang budayanya, berarti dia dapat mengenali dirinya. Karena budaya hasil karya atau ciptaan manusia. Orang dapat mengetahui orang lain (perilaku dan wataknya) dengan jalan mempelajari kebudayaannya atau lingkungannya.

3. Kurikulum Muatan Lokal sebagai batu loncatan mencerdaskan kehidupan bangsa

Kurikulum muatan lokal sebagai sistem kehidupan masyarakat lokal yang tepat untuk membelajarkan, mencerdaskan, membudayai dan memberadabkan tidak hanya berfungsi bagi masyarakat di tempat itu. Dengan terpelajar, cerdas dan berbudaya serta beradabnya masyarakat di setiap daerah berarti telah terbentuk masyarakat Indonesia yang terpelajar, cerdas, berbudaya dan beradab pula. Karena daerah merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Dalam konsepsi pembangunan di Indonesia, membangun daerah berarti meletakkan dasar bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan.

4. Kurikulum muatan lokal sebagai mesin pembudaya

Kurikulum muatan lokal sebagai sistem kehi-

dupan masyarakat setempat yang berinteraksi dengan sistem alam menjadi sistem kehidupan yang berfungsi sebagai alat yang kuat bagi upaya pembudayaan. Muatan lokal dengan berbagai bentuknya yang secara utuh dan menyeluruh berfungsi sebagai sistem pembudayaan masyarakat setempat.

VI. PENDEKATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Dalam pengembangan kurikulum muatan lokal diperlukan suatu pendekatan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Pendekatan pengembangan kurikulum muatan lokal dalam tulisan ini mencakup: langkah-langkah mengidentifikasi unsur-unsur muatan lokal dan, cara-cara melaksanakan kurikulum muatan lokal dalam kegiatan belajar mengajar.

A. Langkah-Langkah Mengidentifikasi Unsur Muatan Lokal

Secara konseptual langkah-langkah dalam mengidentifikasi unsur muatan lokal, pada prinsipnya tidak berbeda dengan langkah-langkah dalam mengidentifikasi kurikulum pada umumnya.

Suatu mata pelajaran beserta unsurnya tidak mungkin secara otomatis diperoleh tanpa adanya aktivitas yang dilakukan oleh pengembangnya. S. Audean Allman, dkk (1980), mengemukakan bahwa dalam rangka mengidentifikasi ini diawali dengan langkah

524/K/97-K, (2)

27.11.1984
BEM
L

pengujian lapangan (field testing). Langkah semacam ini dilakukan pada dasarnya adalah mengakomodasi unsur-unsur muatan lokal yang benar-benar sesuai dengan kondisi, kebutuhan masyarakat dan potensi lingkungan. Jika langkah ini tidak ditempuh, maka cenderung program yang ditawarkan dalam program muatan lokal di sekolah akan mubazir. Langkah berikutnya adalah melakukan proyek percontohan (pilot programming) terhadap unsur-unsur muatan lokal yang diperoleh dari lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui layak-tidaknya mata pelajaran atau unsur-unsur muatan lokal diterapkan di sekolah-sekolah secara menyeluruh. Dari langkah ini juga diketahui hal-hal seperti, daya serap peserta didik, metode mengajar yang cocok, kendala-kendala yang dihadapi dan sebagainya.

Langkah ketiga disebut dengan pengambilan keputusan (decision program), maksudnya penentuan bagi unsur-unsur muatan lokal setelah adanya langkah pertama dan kedua di atas. Dalam hal ini apakah akan dipertahankan menjadi mata ajaran atau harus dihilangkan. Untuk mempertahankan atau menghilangkannya bukanlah suatu pekerjaan mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Setelah diputuskan oleh pengembang, mana yang dipertahankan dan mana yang dihilangkan tidak berarti bahwa unsur-unsur muatan lokal (terutama yang dipertahankan)

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

langsung dijalankan. Karena diperlukan pula pandangan-pandangan dari sebuah komisi (committee) yang disebut *role of a review committee* sebagai langkah ke empat.

Komisi ini terdiri dari orang-orang yang cukup berkompeten atau ahli dalam berbagai disiplin ilmu, dalam rangka memberikan berbagai pandangan terhadap yang diputuskan oleh tim pengembang. Jadi peranan komisi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal ini sangat penting, bahkan sangat menentukan layak-tidaknya suatu program sebelum diterapkan di sekolah.

Langkah ke lima yang harus dilakukan adalah model *approval*. Model ini merupakan langkah permintaan persetujuan dari pihak atasan yang berwenang terhadap program yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Bagi kita di Indonesia pihak atasan ini adalah Menteri Pendidikan Kebudayaan.

Langkah terakhir yang harus dilakukan setelah mendapat persetujuan, maka selanjutnya memasuki langkah pelaksanaan program di sekolah secara menyeluruh (*total school implementation*).

Jika diperhatikan rangkaian langkah-langkah pengembangan di atas, tampaklah bahwa dalam mengidentifikasi program ini tidak mudah. Untuk mengidentifikasinya tampaknya memerlukan pikiran, tenaga, waktu biaya dan sarana yang memadai. Di samping itu, dalam melakukan kegiatan ini harus

dilakukan secara bertahap atau adanya pentahapan tertentu yang harus dilalui, seperti; tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi sehingga program yang dikembangkan menjadi berhasil guna dan berdaya guna. Dalam konteks lain, dapat dikatakan, bahwa jika dalam mengidentifikasi unsur-unsur muatan lokal mengikuti kegiatan-kegiatan seperti dikemukakan di atas, maka berbagai potensi daerah dapat lebih dikembangkan. Selain itu, minat, kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

B. Cara-Cara Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal

Dalam Kegiatan Belajar Mengajar.

Cara-cara di sini mengacu kepada metode. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal ini: yakni:

1. Metode Survey

Pada dasarnya metode survey memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terjun ke dalam masyarakat. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (1988:101), bahwa: "Anak-anak sejak sekolah dasarpun diharuskan turut serta dalam survey kemasyarakatan serta kegiatan-kegiatan sosialnya". Lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar dianggap tidak efektif jika dilakukan di dalam kelas/sekolah,

peserta didik dapat melihat sendiri, merasakan sendiri apa yang terdapat dan terjadi di lingkungannya atau di masyarakat sekelilingnya.

2. Metode Karyawisata

Pada prinsipnya metode karyawisata tidak berbeda dengan metode survey. Dalam pelaksanaannya, metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kunjungan ke berbagai objek yang ada di sekitarnya. S. Nasution (1986), menyatakan bahwa tujuan penggunaan metode karyawisata adalah agar peserta didik mengetahui dan mengalami objek sebagaimana keadaan sebenarnya atau aslinya di tempat di mana objek itu berada.

Dengan demikian, dampaknya yang dapat dipetik langsung adalah terjadinya pemahaman yang mendalam, sehingga pengajaran yang sifatnya verbalistik dapat dihindari.

3. Metode Eksperimen

Metode eksperimen pada hakekatnya adalah suatu cara mengajar dan belajar yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari, menemukan, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang sesuatu objek dan suatu proses. Dengan kata lain bahwa melalui eksperimen peserta didik dapat

membuktikan benar tidaknya suatu teori, konsep tau pendapat yang dibaca atau didengarnya.

4. Metode Bermain Peran

Melalui metode bermain peran, peserta didik dididik untuk ikut serta merasakan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sendiri maupun yang terjadi di dalam masyarakat. Penerapan metode bermain peran ini, terutama dalam rangka membentuk sikap peserta didik agar peduli terhadap lingkungannya.

5. Metode Inkuiri.

Pada hakekatnya metode inkuiri bertujuan untuk menolong peserta didik berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri apa yang menjadi kepentingannya. Sebagai konsekuensi dari penerapan metode ini adalah, guru lebih berperan sebagai pengarah dan pembimbing dan pencipta kondisi belajar, sehingga menimbulkan kreativitas dan produktivitas pada peserta didik.

Cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan kurikulum muatan seperti yang dikemukakan di atas tidak terbatas hanya itu saja, namun masih dapat dikembangkan lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Allman, A. S. et.al. (1980). *Curriculum Development: A Reflection of Programmatic Trend*. Boston: American Press.
- Depdikbud. (1987). *Petunjuk Penerapan Muatan Lokal Kurikulum SD*. Jakarta: Depdikbud.
- _____. (1989). *Undang-Uandang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kreasi Jaya Utama.
- _____. (1993) *Kurikulum Muatan Lokal Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Kanwil Depdikbud.
- Iskandar, Anwas. (1988). *Muatan Lokal Sebagai Pangkal Tolak Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Sebuah Pemikiran Awal*. Makalah pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia I. Bandung.
- Gafar Fakry, M. (1990). *Implikasi Desentralisasi Pendidikan Menyongsong Abad ke 21*. Bandung: Mimbar Pendidikan.
- Joni Raka, T. (1990). *Organisasi Pendidikan Dasar Kita*. CSIS, Tahun XVIII, Nomor 4. Jakarta: CSIS.
- Nasution, S. (1986). *Didaktik Azas-Azas Mengajar*. Bandung: Jemmars.
- Soedjiarto. (1988). *Kurikulum Nasional Yang Relevan Dengan Tuntutan Pembangunan Nasional dan Implikasinya Bagi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal*. Makalah pada Konvensi Nasional pendidikan Indonesia I, Bandung.
- Sukmadinata N, Syaodih. (1988). *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: P2 LPTK.
- Wahab Aziz. (1990). *Profesionalisme dan Inovasi Dalam Desentralisasi Pendidikan*. Mimbar Pendidikan No.3 Tahun IX, Edisi Oktober. Bandung University Press.